

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie. Jimly, 2005 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2006 *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

Budiarjo, Miriam. 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Pusat Bahasa.

Garner, Bryan, *Black's law dictionary*, 10th, (West Group, 2014) ISBN 978-0-314-61300-4

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip perumusan kebijakan negara*; PT Bumi Aksara

- Isra, Saldi. 2010 *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007 *Pedoman Naskah Akademik(Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik), Kreasi Total Media (KTM)*, Yogyakarta.
- Maksudi, Benny. 2011 *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2005 *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Cetakan Ketiga, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2006 *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal DPD, 2008 *Hasil-Hasil Pelaksanaan Tugas Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta.
- Setjen DPD RI, 2013, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setjen DPD RI, Jakarta..
- Silalahi, Uber, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Simabura, Charles 2011 *Parlemen Indonesia, Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekonto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2004 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Roni 1983. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.

Yunus, Ahsan 2011, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

B. Jurnal

Arsyad, Sanusi, H.M. 2009 “*Artikel: Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan*” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol 6 No.2, Jakarta.

Faqih, Mariyadi. 2010 *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 3.

Kushandajani, 2009 “*Menakar Peran Dewan Perwakilan Daerah RI*” *Jurnal Konsitusi* Vol 1 No 1 PKK FH UNDIP

Ratna Herawati, 2015 “*Implikasi sistem pengisian keanggotaan dewan perwakilan daerah republik Indonesia terhadap nilai-nilai pancasila*”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* vol 44 no 4 FH UNDIP

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD , DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XII/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib

D. INTERNET

<http://hukum.kompasiana.com/2013/04/16/anotasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-92puu-x2012-551772.html> (diakses pada tanggal 8 April pukul 17.00 WIB)

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/28/sitem-perwakilan-rakyat-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 9 Mei pukul 17.00 WIB)

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/902250-menengok-sejarah-pembentukan-peran-dan-fungsi-dpd> (Diakses pada tanggal 08 Juni 2017 Pukul 14.00 WIB)